

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH PADA KANTOR CAMAT PAMATANG
SILIMA KUTA KAB. SIMALUNGUN**

SKRIPSI

**OLEH
DEVI NATALIA SIPAYUNG
16.833.0126**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah pada kantor camat pematang silima kuta Kab. Simalungun

Nama : DEVI NATALIA SIPAYUNG


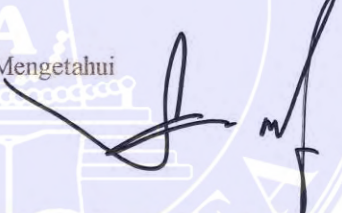
NPM : 16.833.0126

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

 
(Mohd Idris Dalimunthe SE, Msi) (Eky Ermal Muttakin SE, Msi, MAFin)
Pembimbing I Pembimbing II

Mengetahui

  4/8 20
(Dr. Husein Efendi, SE, Msi) (Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, Ak, M.Acc)
Dekan K.a Prodi Akuntansi

Tanggal lulus : 14 Mei 2020

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEVI NATALIA SIPAYUNG

NPM : 16.833.0126

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 14 Mei 2020

Yang menyatakan



DEVI NATALIA SIPAYUNG

16.833.0126

Halaman Pernyataan

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 14 Mei 2020



Dévi Natalia Sipayung
16.833.0126

RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Dusun SIPPAN, Kecamatan Pamatang Silima Kuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Pada tanggal 17 Desember 1997 dari ayah Jhonsius Sipayung dan Ibu Riahate br Ginting. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Tahun 2016 peneliti lulus dari SMA SWASTA van DUYNHOVEN SERIBUDOLOK, dan pada tahun 2016 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial dan simultan Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (X1) dan kualitas aparatur pemerintah daerah (X2) Terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif. Populasi pada penelitian ini adalah Seluruh karyawan yang ada di kantor camat pematang silima kuta KAB. Simalungun yaitu sebanyak 70 orang. Sampel penelitian ini adalah karyawan yang memenuhi kriteria yaitu 32 karyawan. Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah yang mengetahui tentang laporan keuangan daerah, hal ini bertujuan untuk menghindari perbedaan karakteristik antara karyawan yang mengetahui laporan keuangan dan karyawan lainnya, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linear berganda dengan menggunakan bantuan SPSS Versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial standar akuntansi pemerintah (X1) berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, kualitas aparatur pemerintah daerah (X2) berpengaruh dan tidak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Dan secara simultan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : standar akuntansi pemerintah, kualitas aparatur pemerintah daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah

Abstract

This study aims to determine partially and simultaneously the effect of the adoption of government accounting standards (X1) and the quality of the local government apparatus (X2) on local government financial reports (Y). The type of research used is associative. The population in this study were all employees in the Pamatang Silima sub-district office, Simalungun Regency, as many as 70 people. The sample of this study is employees who meet the criteria of 32 employees. The company criteria used as a sample in this study are those who know about regional financial statements, this aims to avoid differences in characteristics between employees who know the financial statements and other employees. Types of data used in this study are primary data. The data source used in this study is primary data. The technique used by the author to collect the data needed in research is a questionnaire. This study uses multiple linear analysis techniques using SPSS Version 21. The results show that partially government accounting standards (X1) have a significant effect on local government financial reports, the quality of local government apparatus (X2) influences and not significantly on local government financial reports . And simultaneously government accounting standards and the quality of local government officials affect the financial statements of local governments.

Keywords: government accounting standards, the quality of local government officials and local government financial reports

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang atas Berkah, karunianya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi di Universitas Medan area.

Penulis dalam kesempatan ini menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna disamping itu masih banyak kekurangan serta kejanggalan, baik dari bahasa, isi dan tulisan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menginginkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk kesempurnaan tulisan ini.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati tidak lupa mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya baik secara moril dan material, serta doa yang tak pernah putus untuk kemudahan buat anak – anaknya.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Msc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, MSi, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, AK, M.Acc Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan area.

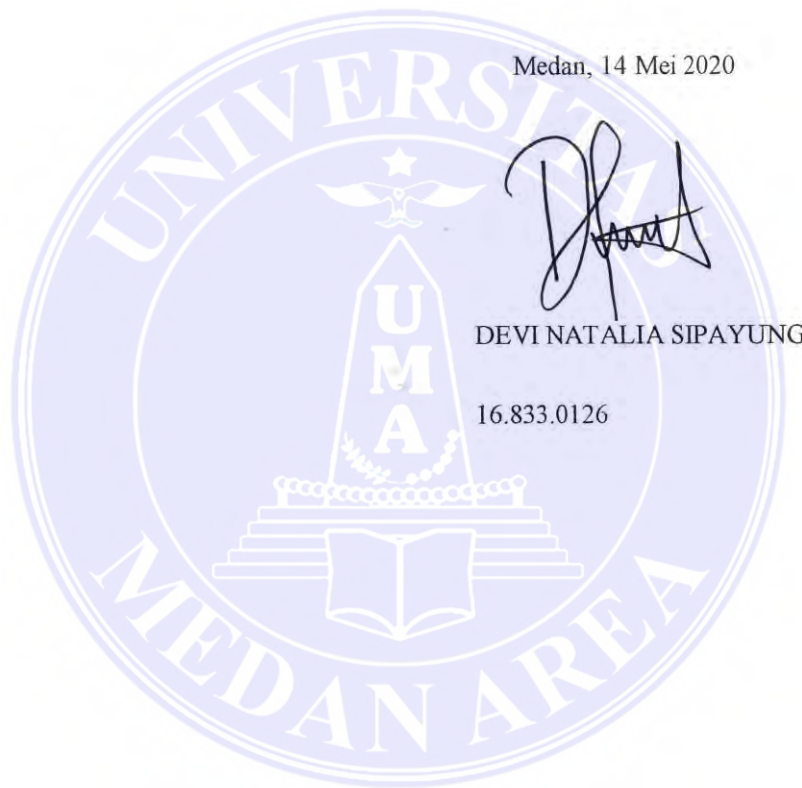
5. Bapak Mohd. Idris Dalimunte, SE.MSi, Selaku Pembimbing I yang telah memberikan sumbangan waktu dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis.
6. Bapak Eky Ermal SE, M,Si,MAFin Selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Ekonomi yang telah mengajar dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan.
8. Seluruh Keluarga yang tersayang abang dan adek penulis, Meykel Syaputra Sipayung ST dan Daniel Paul Sipayung yang telah memberi semangat dan dukungannya kepada penulis.
9. Saudara dan saudari yang ada di medan yaitu, Indra geovani Sipayung, Ezra Hotdiarta Sipayung, Dea Jhon Sipayung (Decank), Indra Hamonangan sipayung (Pay), Gidion Rizky Sipayung, Defardo Sigiros, Mini Pong Silalahi, Leo Vince Siburian, Wesly Delvin Rumahorbo, Tika Natalia Manihuruk, Riko Manihuruk, Andi Purnama Manihuruk, Billyardo Manihuruk, yang telah memberikan dukungan dan semangat buat sipenulis.
10. Seluruh Sahabat Penulis, Laura Simanjuntak, Wenny Apprindu Silitonga, Asnaria Barus, Ratna Sari br Sijabat, Erpinaria Lubis, Friska Anita Br Tarigan dan lain-lain serta teman-teman yang tidak bisa disebut satu persatu.

Di dalam penyusunan laporan penulis menyadari masih dapat kekurangan dan kesalahan dalam menyusun laporan ini. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan

dalam penulisan selanjutnya. Akhir kata semoga hasil penulisan ini akan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan kepada pembaca.

Akhirnya Semoga Tuhan Yang Maha Esa Memberi Berkat dan Karunia Kepada Kita semua. Amin.

Medan, 14 Mei 2020



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS	
AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjian Teoritis	8
2.1.1 Laporan Keuangan.....	8

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan.....	8
2.1.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	9
2.1.1.3 Indikator Laporan Keuangan Pemerintah.....	10
2.2 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah	12
2.2.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.....	13
2.2.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	14
2.2.2 Indikator Standar Akuntansi Pemerintah.....	16
2.3 Pengertian Aparatur Pemerintah Daerah	16
2.3.1 Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah.....	17
2.3.2 Indikator Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah	18
2.4 Pengeruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan.....	18
2.5 Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan	19
2.6 Penelitian Terdahulu.....	21
2.7 Kerangka Konseptual	22
2.8 Hipotesis	22

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, lokasi dan waktu penelitian	23
--	----

3.1.1 Jenis Penelitian	23
3.1.2 Lokasi Penelitian	23
3.1.3 waktu penelitian.....	23
3.2 Populasi dan Data	24
3.2.1 Populasi	24
3.2.2 Sampel.....	24
3.3 Defenisi Oprasional Variabel	25
3.4. Jenis dan Sumber Data	26
3.4.1 Jenis Data	26
3.4.2 Sumber Data.....	26
3.5 Tehnik Penumpulan Data	27
3.6 Tehnik Asumsi Klasik	27
3.6.1 Uji Kualitas Data	28
3.6. 1.1 Validitas.....	28
3.6.1.2. Reliabilitas.....	28
3.7 Uji Hipotesis.....	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitan.....	33
4.1.1 Gambaran Umur Kantor Camat Pamatang Silima Kuta...	33
4.2 Visi dan Misi	34

4.3 Struktur Organisasi.....	35
4.4 Distribusi Kuisisioner.....	36
4.4.1 Karateristik Responden.....	36
4.5 Hasil Jawaban Responden	38
4.5.1 Variabel Idependen Laporan Keuangan Pemerintah	39
4.5.2Variablen Dependen Penerapan Standar Akuntans pemerintah (X1).....	42
4.5.3 Variabel Dependen Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah (X2).	45
4.6 Pembahasan	47
4.6.1 Uji Validitas Dan Realibitas	47
4.7 Uji Statistik.....	49
4.7.1 Uji Normalitas.....	49
4.7.2 Uji Multikonolinieritas... ..	52
4.7.3 Uji Heteroskedasitas	53
4.8 Uji Regresi Linear Berganda	53
4.9 Uji Hipotesis	54
4.9.1 Pengujian Hipotesis Parsial	54
4.9.2 Pengujian Hipotesis Simultan.....	55

4.9.3 koefisien Determinasi (R^2)	56
---	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	58
---------------------	----

5.2 Saran	59
-----------------	----



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 : Kerangka Konseptual.....	22
Gambar IV.1 : Struktur Organisasi	35



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 penelitian terdahulu	20
Tabel 3.1 waktu penelitian.....	23
Tabel 3.2 defenisi oprasional.....	25
Tabel 3.3 instrumen skala likert.....	27
Tabel 4.1 Distribusi Kuisisioner.....	36
Tabel 4.2 Distribusi usia responden.....	37
Tabel 4.3 Distribusi jenis kelamin responden.....	37
Tabel 4.4 Distribusi pendidikan responden	38
Tabel 4.5 Laporan keuangan yang saya susun sesuai Dengan SAP, dengan informasi yang lengkap mencakup semua Informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.....	39
Tabel 4.6 Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya.....	39
Tabel 4.7 Dalam menyusun laporan keuangan, saya telah menggunakan	

kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun	40
Tabel 4.8 Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna	40
Tabel 4.9 Laporan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah mengerti dan dipahami	41
Tabel 4.10 Saya selalu menerapkan basis akrual dan basis kas untuk mengakui transaksi/ peristiwa yang terjadi	42
Tabel 4.11 Pada instansi tempat saya bekerja, telah menggunakan akrual untuk mengakui asset.....	42
Tabel 4.12 Saat terjadi pengeluaran dari rekening kas pada instansi tempat saya bekerja telah diakui sebagai belanja	43
Tabel 4.13 saya selalu menyusundan menyajikan LAK sesuai dengan SAP, dan menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas oprerasi	43
Tabel 4.14 pada instansi tempat saya bekarja, telah menyajikan catatan atas laporan keuangan pada setiap periode pelaporan	44
Tabel 4.15 Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada saya	

Tabel 4.29 Koefisien Korelasi dan R-Square..... 57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keuangan Daerah merupakan wujud pertanggung jawaban atas akuntabilitas publik yang juga menjadi salah satu ukuran kinerja pemerintah daerah, sehingga peran pengawasan dan peran setiap instansi atau SKPD dapat dilihat sebagai kinerja strategis (Jamanson Sinaga, 2005). Dengan kata lain kualitas laporan keuangan pemerintah sangat di pengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem akuntansi yang handal untuk Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) direvisi dari peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dimana SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan (Ovita Charolina, 2013)

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan fundamental Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai hal tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan (Zeyn, 2011).

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful*. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP.

Terkait dengan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan oleh pamarintah, maka yang perlu diperhatikan adalah kompetensi sumber daya manusia yang terlihat dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah untuk penerapan akan SAP yang berlaku. Penerapan terhadap SAP yang diperlukan agar hasildari laporan

keuangan daerah yang berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami).

Kualitas aparatur pemerintah daerah dalam suatu organisasi terutama organisasi pemerintahan terkait upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tidak bisa terlepas dari adanya unsur sumber daya manusia sebagai penggerak jalannya organisasi. Sumber daya manusia menjadi penentu berjalan tidaknya suatu, selain ketersediaan sarana mau pun prasarananya. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Agar terdapat manusia-manusia yang berkualitas atau manusia yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya manajemen sumber daya manusia (MSDM). Dengan adanya otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Implikasinya adalah pemerintah daerah harus memberikan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Pemerintah daerah sangat membutuhkan PNSD yang profesional dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi di bidangnya dan memiliki jiwa berkompetisi yang sportif. PNSD yang profesional akan mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara tuntas. Dengan kompetensi yang dimilikinya, PNSD dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. PNSD yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini berarti kualitas PNSD di bidang akuntansi (keuangan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah.

Fenomena yang terjadi adalah laporan keuangan pemda yang masih rendah disebabkan oleh permasalahan aset yang masih menjadi salah satu fokus perhatian pemda sejak resmi didirikan dari Kabupaten Simalungun pada 2007 lalu. Yang menjadi persoalannya hingga saat ini, pihaknya sering mendapati sejumlah catatan mengenai aset dari induk Kabupaten simalungun yang masuk ke dalam catatan aset Simalungun pada saat pelimpahan, sementara pada kenyataannya sendiri aset tersebut sudah tidak ada. Misalkan dalam catatan di induk, tapi sebenarnya dari sejak dulu pun aset itu sudah tidak ada di lapangan , Pemda harus kerja keras menata aset-aset yang merupakan pelimpahan dari Kabupaten Simalungun. Aset tersebut mulai dari tanah, bangunan hingga kendaraan. (Maman S Sunjaya 2016).

Rendahnya laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Dari pemeriksaan BPK, banyak temuan berulang dari tahun ke tahun, tanpa ada keterangan bahwa temuan itu sudah ditindak lanjuti atau belum oleh Pemda. Temuan BPK juga menunjukkan sebagian besar laporan keuangan pemda bermasalah pada pencatatan aset/barang milik daerah, umumnya hal itu terjadi karena pencatatan, keberadaan fisik dan pengungkapannya dalam laporan belum memadai (Beni Ruslandi 2012).

Rendahnya kualitas aparatur pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu akuntansi yang menyebabkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten simalungun belum optimal karena aparatur belum bisa menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang baik dan benar .

Lemahnya pengelolaan aset oleh Pemda, disebabkan oleh beberapa hal. Selain kualitas aparatur yang masih kurang memahami laporan keuangan karena jarang mengikuti BIMTEK (bimbingan teknis) tentang laporan keuangan, poin penting lainnya juga adalah lemahnya administrasi aset. Pengelolaan aset ini masih menjadi masalah besar. Misalnya, banyak aset khususnya berupa tanah yang belum disertifikatkan, begitu juga bangunannya, dan hal itu setiap tahun tetap begitu sehingga banyak Pemda yang belum menyajikan laporan keuangan dengan hasil yang maksimal (Deni Suardini 2016).

Hasil laporan keuangan pemda simalungun yang belum optimal disebabkan oleh pelimpahan aset yang kurang lengkap saat pemekaran sejumlah dokumen masih berada di Pemkab Simalungun meskipun asetnya sudah diserahkan ke Pemkab Simalungun. Masalah aset ini memang kerap terjadi ketika ada pemekaran daerah persoalan. Dokumen pelimpahan aset memang tak kunjung selesai, lantaran ada aset yang tidak diurus saat pemekaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Camat Pamatang Silima Kuta Kabupaten Simalungun.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap laporan keuangan pada Kantor Camat Pamatang Silima Kuta Kabupaten Simalungun?
2. Apakah kualitas aparatur pemerintah daerah pemerintah berpengaruh terhadap laporan keuangan pada Kantor Camat Pamatang Silima Kuta Kabupaten Simalungun?
3. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Camat Pamatang Silima Kuta Kabupaten Simalungun?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap laporan keuangan Kantor Camat Pamatang Silima Kuta Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap laporan keuangan Kantor Camat Pamatang Silima Kuta Kabupaten Simalungun.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan standar akuntansi dan kualitas aparatur pemerintah terhadap laporan keuangan pada pada Kantor Camat Pamatang Silima Kuta Kabupaten Simalungun.

1.4 Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sipeneliti berharap dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Selain itu dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah
2. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat diharapkan sumbangan pemikiran dan wawasan kepada pihak yang terkait.
3. Bagi instansi, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi instansi dalam mengetahui sejauhmana kualitas laporan keuangan dapat di pengaruhi oleh faktor penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah.
4. Bagi pihak lainnya, masyarakat akademik umumnya dan mahasiswa pada khususnya seagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenan dengan masalah ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Erlina (2013:21) Laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Deddi Nordiawan (2006:151) Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan dari entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Entitas pelaporan dalam unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah
- c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya

Menurut Bastian (2010:297) Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas Sektor Publik.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

2.1.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Adapun Definisi laporan keuangan menurut Deddi Nordiawan (2012:151) adalah Bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.

Definisi laporan keuangan pemerintah daerah menurut Tanjung (2012 : 12) adalah Laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan menyediakan berbagai informasi laporan keuangan.

Sedangkan definisi laporan keuangan pemerintah daerah menurut Erlina Rasdianto (2013:21) mengemukakan bahwa Suatu hasil dari proses

pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

2.1.1.3 Indikator Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada dasarnya terdapat dua hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu Kinerja Anggaran dan Anggaran Kinerja. Kinerja anggaran merupakan instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah, sedangkan Anggaran Kinerja merupakan instrumen yang dipakai oleh kepala daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada di bawah kendali daerah selakumanager eksekutif. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif (Mardiasmo, 2002:19). Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah adalah sebagai berikut:

a.Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud pengguna.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal yang dilakukan apabila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.” Menurut Sinaga (2005) Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman untuk menyatu kan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

Menurut Wijaya (2008: 313) SAP merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercapai pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah suatu konsep dan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Dari beberapa pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam

rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar Akuntansi Pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

2.2.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan daerah bahwa untuk melakukan ketentuan pasal 7 ayat 3 peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang selambat-lambatnya ditetapkan tahun 2015, perlu menetapkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia tentang penerapan standar akuntansi pemerintah Berbasis Akrual pada pemerintah daerah.

Dalam peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2010 penerapan SAP berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual sebagaimana dimaksud dengan pada ayat (1) pada pemerintahan daerah diatur dengan peraturan menteri dalam negeri. Pada saat peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 dimulai maka peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4503) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan akuntansi pemerintah sepanjang belum diubah dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah dinyatakan masih berlaku.

Penerapan standar akuntansi pemerintah ini merupakan pemahaman yang baik dari setiap aparatur yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan baik dipemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah beserta instansi-instansinya. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah wajib dilaksanakan, akan tetapi didalam penerapan tersebut perlu dipahami beberapa dasar pemikiran penting yang diharapkan dapat membantu dalam penerapan standar akuntansi pemerintah. Pemikiran tersebut adalah mengenai basis akuntansi yang dianut dan hubungan antara sistem dan standar. Selanjutnya diikuti proses penyusunan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah yang berhubungan dengan kondisi masing-masing entitas.

Penerapan standar akuntansi pemerintah yang sesuai dengan pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang merupakan penentu atas kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah perlu dikembangkan untuk memperbaiki praktikum akuntansi keuangan pada lingkungan organisasi pemerintah (Mahamudi,2011:271).

2.2.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b permendagri No 64 Tahun 2013 memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Permendagri No 64 Tahun 2013 terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dalam Permendagri No 64 Tahun 2013 terdiri atas Sistem Akuntansi PPKD dan Sistem Akuntansi SKPD. Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam Permendagri No 64 Tahun 2013 mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam Permendagri No 64 Tahun 2013 mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

2.2.3 Indikator Standar Akuntansi Pemerintah

Dimensi yang digunakan untuk mengukur variabel Standar Akuntansi Pemerintah adalah indikator yang dikemukakan berdasarkan Pemerintah No 71 Tahun 2010 terdiri dari:

- a. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan
- b. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- c. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas
- d. PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan

2.3 Pengertian Aparatur Pemerintah Daerah

Aparatur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: “Aparatur adalah perangkat, alat (negara, pemerintah); para pegawai (negeri); negara alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketata laksanaan dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari; pemerintah pegawai negeri; alat negara; aparatur negara”.

Menurut Jimmy L. Gaol (2015:133) Aparatur pemerintah adalah aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah, termasuk BUMN atau BUMD yang berfungsi selaku aparatur perekonomian Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

SKPD harus memiliki sumber daya yang kompeten, yang di dukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengaman di bidang keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik. Hal tebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Kegagalan Aparatur Pemerintah Daerah dalam memahami dan

menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan tidak sesuai yaang ditetapkan pemerintah Warisono (2008).

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa karakteristik sumber daya yang kompeten, yaitu :

1. Pendidikan Formal
2. Pendidikan dan Pelatihan
3. Pengalaman Kerja.

2.3.1 Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Adapun pengertian dari kualitas menurut Iman Mulyana (2010 : 96) adalah Kesesuaian dengan standar diukur berbasis kadar ketidak sesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.

Pengertian aparatur pemerintah menurut Dharma Setyawan Salam (2004 : 169) adalah Pekerja yang digaji pemerintah melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pengertian aparatur pemerintah daerah menurut Koswara (2001 : 259) adalah Seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan, termasuk PNS pusat yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengertian diatas, kualitas aparatur pemerintah daerah merupakan semua pegawai yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah pada unit organisasi pemerintah daerah mulai dari pemerintahan tertinggi di kabupaten/kota hingga tingkat Desa/Kabupaten.

2.3.2 Indikator Kualitar Aparatur Pemerintah Daerah

Dimensi yang digunakan untuk mengukur kualitas aparatur pemerintah daerah adalah indikator yang dikemukakan yaitu:

1. Pendidikan dan pelatihan
2. Pengalaman
3. Kinerja

2.4 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Laporan Keuangan

Penerapan SAP dapat mempengaruhi laporan keuangan SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun dipemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah (Deddi Nordiawan, 2006:25). Tujuan utama standar akuntansi pemerintah adalah agar laporan keuangan bisa lebih mudah dipahami bagi para pengguna laporan keuangan, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak penyaji dengan pengguna laporan keuangan, serta agar terdapat konsistensi dalam pelaporan sehingga laporan keuangan dapat memiliki daya banding. Dengan adanya standar akuntansi pemerintah maka pelaporan keuangan lebih berkualitas (Mahmudi, 2010:29).

Didukung pula dengan adanya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Imam (2008) menyatakan bahwa Laporan keuangan jendral departemen pendidikan nasional setelah penerapan SAP telah akuntabel yaitu mampu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, mampu memenuhi kebutuhan pengguna akan laporan keuangan, dan telah menyajikan informasi

mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

2.5 Pengaruh kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keuangan

Kualitas merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Aparatur pemerintah daerah yang tidak memiliki kualitas tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu serta tenaga. Dengan adanya kualitas aparatur pemerintah daerah maka waktu pembuatan laporan akan dapat dihemat. Hal ini karena aparatur pemerintah daerah tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002:146).

Dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai (keterandalan) disini menyangkut dua elemen pokok yaitu, informasi yang dihasilkan dan aparatur pemerintah daerah menghasilkannya. Menyangkut informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi untuk member keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Kemudian menyangkut kemampuan aparatur pemerintah daerah yang akan menjalankan sistem atau yang menghasilkan informasi tersebut, yang dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan atau paling tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya di bidang akuntansi. Di sini kemampuan

aparatur pemerintah daerah itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan) (Wahyono, 2014:12).

Peneliti sebelumnya, Amran (2009) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu instansi, dengan adanya sumber daya yang berkompeten tentu akan mempengaruhi terhadap laporan keuangan yang dihasilkan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut

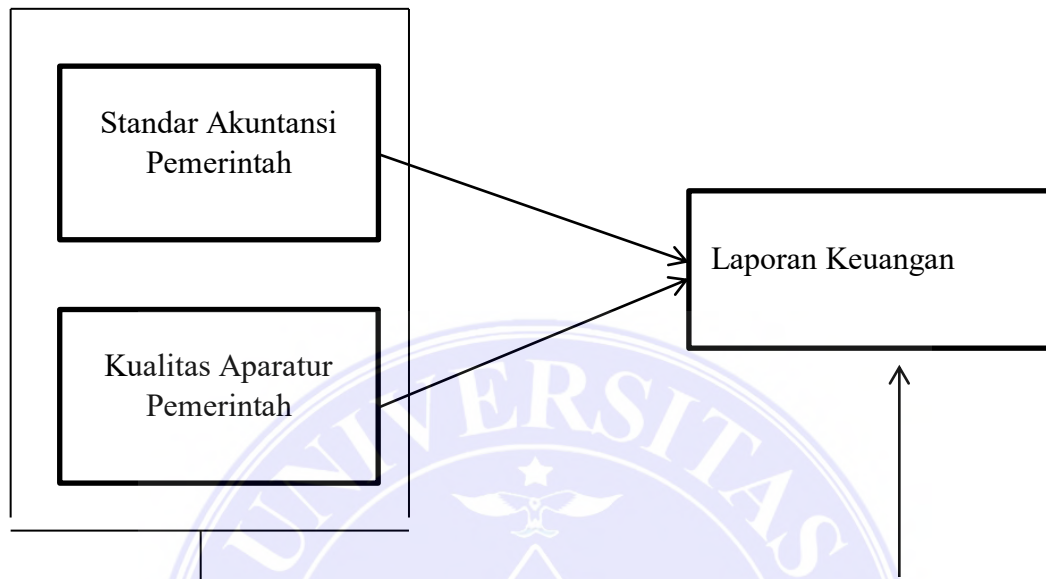
Tabel 2.1
Review penelitian terdahulu

Penulis	Judul	Hasil peneliti
NiLuh Udiyanti, Anan tawikrama Tungga Atmadja, Nyoma Ari surya dermawan	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan	Nilai koefisien regresi standar akuntansi pemerintah rintahan sebesar 0,231. Hal ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi standar akuntansi pemerintahan adalah $0,002 < 0,05$
Vivky Agustiawan lasoma	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo utara Pengukuran: Skala likert, dengan analisis regresi.	Hasil pengujian hipotesis uji t, dimana nilai t-hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel hitung sehingga H_0 ditolak dalam artian hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, nilai signifikan yang diperoleh dalam penelitian ini kurang dari 0,05 sehingga pengaruh yang dihasilkan juga signifikan, dan dengan melihat hasil dari koefisien regresi dengan arah positif maka pengaruh yang dihasilkan juga positif. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila standar

		akuntansi pemerintah yang diterapkan oleh pemerintah baik maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan
Dini Rahmi Hasibuan (2015)	Penerapan penuh SAP berbasis akrual Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Resistensi Terhadap Perubahan, Komunikasi, Kualitas Teknologi Dan Informasi dan Dukungan Konsultan.	Menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Resistensi Terhadap Perubahan, Komunikasi, Kualitas Teknologi Dan Informasi dan Dukungan Konsultan berpengaruh pada Penerapan Penuh SAP Berbasis Akrual
Istaguein (2014)	Transparansi Laporan Keuangan terhadap standar akuntansi pemerintah	Menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap transparansi laporan keuangan.
Permadi (2013)	Laporan Keuangan terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah	Menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.7 Karangka Konseptual

Gambar 2.1 Karangka konseptual



2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan landasan teori yang diajukan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

H2: Kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan

H3: Penerapan standar akuntansi pemerintah dan kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif, dimana penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti di Kantor Camat Pamatang Silima Kuta Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Oktober 2019- selesai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Oktober	Novembar	Desember	Januari
1	Proposal penelitian				
	Penyusunan proposal				
	Bimbingan proposal dan bimbingan proposal				
	Seminar proposal				
	Penelitian				
	Pengumpulan data				

	dan penelitian				
	Analisa data				
	Tahap penyusunan laporan				
	Penulisan laporan				

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2014:389) pengertian wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan di atas jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 70 orang pegawai karena instansi Pemerintahan Kantor Camat Pamatang Silima Kuta Kabupaten Simalungun.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2014:116) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Menurut Sugiyono (2016:118) sampling dengan teknik yang di ambil yaitu teknik sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan cara

menentukan ciri-ciri kusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan penjelasan tersebut maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah 32 pegawai.

3.3 Defenisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terkait. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Standar Akuntansi Pemerintah (variabel X1), Kualitas Laporan Keuangan (variabel X2), dan variabel terkait dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan (variabel Y).

Tabel 3.3 Defenisi Oprasional

VARIABEL	DEFENISI	INDIKATOR
Standar Akuntansi Pemerintah(X1)	Standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas laporan keuangan pemerinah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah(LKPD). Laporan keuangan pokok dalam standar akuntansi pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.	a. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan b. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas c. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas d. PSAP No. 04 Catatan atas Laporan Keuangan
Kualitas aparatur pemerintah daerah(X2)	Seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan, termasuk PNS pusat yang diperbentukkan kepada pemerintah daerah.	1. Pendididkan dan pelatihan 2. Pengalaman 3. Kinerja

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(Y)	<p>pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Menurut Erlina (2013:21) Laporan keuangan adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami
---------------------------------------	---	--

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dengan angka-angka dan rumus-rumus atau besaran tertentu yang sifatnya pasti.

3.4.2 Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini, data yang diperlukan peneliti adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah pada Kantor pematang silima kuta Kab. Simalungun. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi wawancara, yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian sehubungan dengan judul penelitian dan kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket yang ditujukan kepada pegawai atau responden di dalam objek penelitian, yakni pegawai yang ada di Kantor Camat pematang silima kuta Kab. Simalungun nilai kuesioner yang ditentukan yaitu :

Tabel 3.4
Instrumen Skala Likert

No.	Pertanyaan	Skor
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Ragu-ragu	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2015:135)

Adapun yang menjadi skala pengukuran data dalam penelitian ini adalah skala likert.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan (Bhakti, 2011). Penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Adapun langkah-langkah pengumpulan data dan penyebaran kuosioner adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner dikirim ke seluruh sampel yang merupakan anggota populasi yang menjadi responden.
2. Setelah satu minggu, peneliti mengumpulkan kuesioner yang telah diisi oleh responden.
3. Setelah batas waktu yang ditentukan dan kuesioner telah dikembalikan oleh responden, peneliti kemudian melakukan pengolahan data jika jumlah kuesioner yang terkumpul sudah lebih dari 30, tetapi jika data belum mencukupi maka dicoba lagi untuk mengirimkan kuesioner kepada responden yang belum mengembalikan kuesioner.

3.6 Analisis Data

3.6.1 Uji Kualitas Data

3.6.1.1 Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya (Ancok, 1998 : 120). Faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain kepatuhan responden mengikuti petunjuk pengisian kuesioner dan tidak tepatnya formulasi alat pengukur yaitu bentuk dan isi kuesioner (Hakim : 1999 dalam widyastuti : 2000). Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut valid
- 2) Jika r_{hitung} negatif atau $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid

3) r_{hitung} dapat dilihat pada kolom *Corrected Item Total Correlation*

Nilai r_{tabel} dapat diperoleh melalui df (*degree of freedom*) = $n-k$, dimana :

n = Jumlah responden

k = merupakan jumlah butir pertanyaan dalam suatu variabel

3.6.1.2. Reliabilitas

Uji reliabilitas menurut Riyadi (2000) dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,5 (Nunnally, 1967 : 120). Langkah-langkah melakukan uji reliabilitas terhadap suatu konstruk variabel sama dengan melakukan uji validitas. Output SPSS untuk uji reliabilitas akan dihasilkan secara bersama-sama dengan hasil uji validitas.

3.6.2 Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots) dengan variabel dependen (y) analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen apakah masing –masing variabel independen berhubungan positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yg di gunakan biasanya bersekala interfal atau rasio

Model analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Transparansi pengelolaan keuangan daerah (variabel dependen)

X_1 = Aksesibilitas laporan keuangan daerah (variabel independen)

X_2 = Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (variabel independen)

a = Konstanta

b_1 = koefisien regresi X_1 (arah garis regresi yang menyatakan perubahan nilai Y , akibat perubahan X_1)

b_2 = koefisien regresi X_2 (arah garis regresi yang menyatakan perubahan nilai Y , akibat perubahan X_2)

e = Kesalahan residual (*error term*)

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi, maka diperlukan pengujian asumsi klasik yang meliputi pengujian : (a) normalitas, (b) multikolinearitas, dan (c) heterokedastisitas.

3.6.3.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi suatu data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yaitu distribusi data dengan bentuk lonceng (*bell shaped*). Data yang dikatakan baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal.

Pedoman pengambilan keputusan dengan uji Kolmogorov-Smirnov tentang data tersebut mendekati atau merupakan distribusi normal dapat dilihat dari :

- a. Nilai sig. atau signifikan atau probabilitas $< 0,05$, maka distribusi data adalah tidak normal
- b. Nilai sig. atau signifikan atau probabilitas $> 0,05$, maka distribusi data adalah normal

3.6.3.2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini kita sebut variabel-variabel bebas ini tidak ortogonal. Variabel-variabel bebas yang bersifat sama dengan nol. Jika terjadi korelasi sempurna diantara sesama variabel bebas, maka konsekuensinya adalah :

1. Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir
2. Nilai *standar error* setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Ada dua cara yang dapat dilakukan jika terjadi multikolinieritas, yaitu :

1. Mengeluarkan salah satu variabel, misalnya variabel independen A dan B saling berkorelasi dengan kuat, maka bisa dipilih A atau B yang dikeluarkan dari model regresi
2. Menggunakan metode lanjut seperti Regresi Bayesian atau Regresi Ridge

Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antara variabel bebas (*independent variabel*). Jika nilai korelasi antara variabel bebas tersebut lebih besar dari 0,7 (Nunnally, 1967), maka dapat dikatakan bahwa adanya gejala multikolinieritas. Disamping dengan melakukan uji korelasi

tersebut, pengujian ini juga dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari model penelitian, jika nilai VIF diatas 2 (Hair, 2003), Masalah Multikolinearitas terjadi apabila nilai Tolerance nya $< 0,10$ atau jika suatu variabel independen mempunyai nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2013). maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi gejala multikolinieritas dalam model penelitian.

3.6.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* di sekitar nilai X_1 , X_2 , X_3 , dan Y . Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang digunakan hanya terbatas pada ketiga uji di atas, sedangkan uji autokorelasi tidak digunakan. Hal ini dikarenakan uji autokorelasi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ atau sebelumnya muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan yang lainnya, maka uji autokorelasi ini sering ditemukan pada *time series*, sedangkan data yang dikumpulkan oleh penulis ada data *crosssection*, maka masalah autokorelasi relatif tidak terjadi.

3.6.5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Menurut Kuncoro (2003 : 216), sebagai alat statistik, regresi bermanfaat dalam menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut, (1) seberapa jauh variasi perubahan variabel dependen mampu dijelaskan oleh seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model; (2) manakah di antara variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen; (3) apakah dengan dimasukkannya tambahan satu variabel independen dapat memperbaiki prediksi terhadap variabel dependen; (4) apakah prediksi terhadap variabel dependen dari sejumlah variabel independen lebih baik dibandingkan dengan kombinasi variabel independen yang lain; dan (5) apakah penambahan sampel/observasi akan meningkatkan daya prediksi model.

Pada penelitian ini pendekatan analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis linear berganda. Metode analisis linear bergandadigunakan untuk melihat secara langsung pengaruh beberapa variabel dependen tersebut.

3.6.5.1.Uji Parsial (Uji-t)

Uji statistik t dikenal juga sebagai uji signifikansi individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah :

$H_0 : b_1 = 0$, artinya suatu variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

$H_a : b_1 \neq 0$, artinya suatu variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen

Kriteria pengambilan keputusan :

Apabila probabilitas $< \alpha = 5\%$, maka H_a diterima

Apabila probabilitas $> \alpha = 5\%$, maka H_a ditolak

3.6.5.2. Uji Simultan (Uji-F)

Uji-F digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Melalui uji statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut :

H_0 : $b_1=b_2=b_3=0$, artinya secara bersama-sama (simultan) variabel independen tidak terdapat pengaruh terhadap variabel dependen

H_a : $b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$, artinya secara bersama-sama (simultan) variabel independen terdapat pengaruh terhadap variabel dependen, dengan kriteria :

H_0 diterima, apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H_a diterima, apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan analisa regresi berganda. Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji F atau yang biasa disebut dengan *Analysis of Variance (ANOVA)*. Pengujian ANOVA atau Uji F bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat tingkat signifikansi atau dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Pengujian dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil signifikansi pada tabel ANOVA

$< \alpha 0,05$, maka H_0 ditolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila tingkat signifikansi pada tabel ANOVA $> \alpha 0,05$, maka H_0 diterima (tidak berpengaruh).

Pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($\alpha 0,05$) maka H_0 ditolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($\alpha 0,05$) maka H_0 diterima (tidak berpengaruh). Adapun F_{tabel} dicari dengan memperhatikan tingkat kepercayaan (α) dan derajat bebas (*degree of freedom*).

3.6.5.3. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Pengujian koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika R^2 semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) adalah besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan demikian sebaliknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pemaparan dan pembahasan data di atas maka kesimpulan dari hasil penelitian adalah:

1. Secara simultan, penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah pada kantor camat pematang silima kuta Kab. Simalungun.
2. Secara parsial, hanya standar akuntansi pemerintah yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah pada Kantor camat pematang silima kuta Kab. Simalungun.
3. Kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah pada kantor camat pematang silima kuta Kab. Simalungun.
4. Berdasarkan nilai *R Square* diperoleh angka sebesar 0.465 yang berarti bahwa 46.5% laporan keuangan di pengaruhi oleh standar akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah, sedangkan 53.5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

5.2 Saran

berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. pemerintahan kantor camat sebaiknya memperbaiki dan meningkatkan aspek – aspek mengenai penyajian laporan keuangan daerah, seperti penyajian laporan yang lengkap, tepat waktu, mudah dipahami, dan lain sebagainya guna meningkatkan kepercayaan masyarakat yang berwujud terhadap peningkatan kualitas aparatur, pengelolaan keuangan.
2. Pemerintahan kantor camat lebih meningkatkan dan mengikuti peraturan SAP pemerintah untuk mendapatkan laporan keuangan yang baik.
3. Pemerintahan kantor camat lebih meningkatkan kualitas aparatur pemerintah supaya dapat laporan keuangan yang baik.
4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat lebih menyempurnakan penelitian ini dengan menggunakan variabel – variabel lain yang lebih lengkap dan beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif bakhtiar, et. Al., 2002 *akuntansi pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat,
- Bastian, Indra, 2010 *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Erlangga,
- Nordirawan, Deddi, et. al., 2009 *Akuntansi Pemerintah*, Jakarta: Salemba Empat,
- Erlina dan Rasdianto, 2013 *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, Medan: Brama Ardian,
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, 2013 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hoesada, Jan, Bunga Rampai 2016 *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Juwita, Rukmi, 2013 *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, dalam jurnal Trikonomika, Volume 12, No 2: 1411-514X,
- Moleong, Lexy 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2015
- Ningtyas, Pravitasari Eka, *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, dalam Jurnal Ilmu dan Akuntansi, Vol. 4 Nomor 1.
- Nurlaila, 2014 *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar,
- Prasetya, Gede Edy, Andi 2013 *Penyusunan & Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang **Standar Akuntansi Pemerintah.**
- QS. Al-Baqarah ayat 282.
- Renyowijoyo, Muindro, 2013 *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Nir Laba*, (Jakarta: Mitra Wacana Media,.

Ritonga, Andika Fransiska, 2015 *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada DPKAD Pemerintahan Kota Bandung* Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.

Saroso, Samiaji, 2012 *penelitian Kualitatif: Dasar-dasar* Jakarta: Indeks Penerbit.

Sumarsono, Soony, 2010 *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiono, 2010 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Udiyanti, Ni Luh Nyoman Ari, 2014 *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi kasus pada SKPD Kabupaten Buleleng* dalam jurna S1 Ak Universitas pendidikan Ganesha, Volume 2 No: 1

Utami S, Intan Safrina, 2012 *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Pemukiman Sumatera Utara*, Skripsi Akuntansi Universitas Negeri Medan,



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
KECAMATAN PAMATANG SILIMA HUTA
 JALAN TUAN PADI RAJA GIRSANG – TIGA RAJA

KODE POS : 21167

SURAT KETERANGAN

Telah Melaksanakan Penelitian
 Nomor : 800/ 35 /36.54.1/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini

N a m a : Drs. ROBENSIUS SEMBIRING
N I P : 19660810 199303 1 007
J a b a t a n : CAMAT PAMATANG SILIMA HUTA
 KABUPATEN SIMALUNGUN

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini

N a m a : DEVI NATALIA SIPAYUNG
N I M : 16.833.0126
Institusi Pendidikan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area Medan
Program Studi : Sarjana (S-1) Akuntansi

Telah melaksanakan Penelitian dengan Baik dan Lancar dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI).

Judul : PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KANTOR CAMAT PAMATANG SILIMA HUTA KABUPATEN SIMALUNGUN.

Waktu Penelitian : 3 hari (3 s/d 6 Februari 2020)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tigaraja 4 Februari 2020



Lampiran 1: Kuesioner.

PENGANTAR KUESIONER PENELITIAN

Kepada

Yth. Bapak/ Ibu

di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Medan Area, bersama ini peneliti bermaksud menyusun penelitian yang berjudul “PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KANTOR CAMAT PAMATANG SILIMA KUTA KAB. SIMALUNGUN

Oleh karena itu, peneliti membutuhkan data penelitian sesuai dengan judul tersebut. Adapun identitas dari peneliti:

Nama : Devi Natalia Sipayung

NIM : 16 833 0126

Fakultas/Prodi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi

Peneliti menyadari sepenuhnya, adanya kuesioner ini mengganggu aktivitas Bapak/ Ibu yang padat. Namun dengan segala kerendahan hati, peneliti mohon kiranya Bapak/ Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Partisipasi Bapak/ Ibu dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan kuesioner sebagaimana sesuai dengan kenyataan pada diri Bapak/ Ibu sangat kami hargai. Kuesioner ini hanya untuk keperluan skripsi, tidak untuk dipublikasikan secara luas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga.

Demikian pengantar kuesioner penelitian ini, atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu, peneliti ucapkan terima kasih.

A. Identitas Responden

Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisis data, kami memerlukan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai responden. Dimohon Bapak/Ibu berkenan mengisi identitas berikut atau memberi tanda *check list* () pada kotak yang tersedia.

Nama :

Umur : Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki/ Perempuan

Lamanya Bekerja :

(Berikan tanda cawang/ check-list () pada kotak yang tersedia)

Pendidikan : SMA Diploma
 Sarjana Pasca Sarjana

(Ket: Coret yang tidak perlu)

Petunjuk pengisian kuesioner:

1. Sebelum menjawab setiap pertanyaan/ pernyataan, mohon dibaca terlebih dahulu dengan baik dan benar.

2. Isilah kuisisioner sesuai dengan kondisi perusahaan tempat Bapak/ Ibu bekerja.

3. Pilihlah salah satu jawaban atau pendapat yang menurut Bapak/ Ibu paling sesuai dengan memberi tanda check-list () pada pilihan yang telah disediakan.

a. SS = Sangat Setuju c. RR = Ragu-Ragu

b. S = Setuju d. TS = Tidak Setuju

e. STS = Sangat Tidak Setuju

Kuisisioner ini dapat digunakan secara optimal bila seluruh pertanyaan terjawab, karena itu mohon diteliti kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab.

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Y)

No	Pernyataan	Opsi				
		ST S	TS	RR	S	SS
	Relevan					
1.	Laporan keuangan yang saya susun sesuai dengan SAP, dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.					
2.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya					
3	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun.					
4.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					
5.	Laporan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami.					

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (X1)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

No.	Pernyataan	Ops				
		ST S	TS	RR	S	SS
	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN					
1.	Saya selalu menerapkan basis akrual dan basis kas untuk mengakui transaksi/peristiwa yang terjadi					
2.	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah menggunakan basis akrual untuk mengakui transaksi/ peristiwa yang terjadi.					
3.	Saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas pada instansi tempat Saya bekerja telah diakui sebagai belanja.					
4.	Saya selalu menyusun dan menyajikan LAK sesuai dengan SAP, dan menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi					
5.	Pada instansi tempat Saya bekerja, telah menyajikan catatan atas laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.					

KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH (X2)

No.	Pernyataan	Ops				
		ST S	TS	RR	S	SS
1.	Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan kepada saya berguna untuk meningkatkan kinerja.					
2.	Pendidikan dan pelatihan yang Bapak/Ibu ikuti dapat meningkatkan pengetahuan dalam pekerjaan Bapak/Ibu					
3.	Pengalaman kerja yang saya miliki, membantu saya menyelesaikan tugas secara efisien.					
4.	Dalam lingkungan kerja, saya dan rekan sekerja dapat memberikan umpan balik bagi organisasi.					
5..	Sebagai pegawai, saya dapat menganalisa setiap jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya.					

NO RESPONDEN	STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (X1)					TOTAL X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	4	5	5	5	5	24
2	5	5	5	4	5	24
3	4	4	5	5	5	23
4	5	5	5	5	4	24
5	5	5	4	5	5	24
6	3	4	4	4	3	18
7	4	4	4	5	4	21
8	4	4	4	4	3	19
9	5	4	5	4	5	23
10	3	3	4	4	4	18
11	3	3	3	4	4	17
12	4	4	3	4	4	19
13	4	5	5	3	5	22
14	4	3	4	4	4	19
15	4	4	4	5	5	22
16	3	5	3	4	4	19
17	5	4	4	4	5	22
18	3	5	3	4	4	19
19	4	3	5	5	5	22
20	5	3	4	3	3	18
21	4	4	5	4	4	21
22	5	4	3	3	4	19
23	4	5	5	4	5	23
24	5	4	5	5	5	24
25	4	3	5	4	5	21
26	3	4	3	4	4	18
27	5	4	5	5	5	24
28	3	4	5	4	4	20
29	4	4	5	5	4	22
30	4	5	3	4	3	19
31	4	5	4	4	3	20
32	5	5	5	5	4	24

NO RESPONDEN	KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH (X2)					TOTAL X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	4	5	4	5	4	22
2	5	5	5	4	5	24
3	3	5	4	5	3	20
4	5	4	5	5	5	24
5	4	4	4	5	4	21
6	4	4	3	4	4	19
7	5	5	4	5	5	24
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	4	4	20
10	5	4	4	4	5	22
11	4	4	3	4	4	19
12	4	4	4	4	4	20
13	5	4	4	3	5	21
14	4	4	4	4	4	20
15	4	5	4	5	4	22
16	5	4	4	4	5	22
17	5	4	4	4	5	22
18	4	4	4	4	4	20
19	4	5	4	5	4	22
20	4	3	4	3	4	18
21	3	4	5	4	3	19
22	4	4	4	3	4	19
23	4	5	4	4	4	21
24	5	5	5	5	5	25
25	4	4	4	4	4	20
26	4	3	4	4	4	19
27	4	5	5	5	4	23
28	4	4	3	4	4	19
29	5	4	4	5	5	23
30	4	5	4	4	4	21
31	5	4	5	4	5	23
32	5	5	4	5	5	24

NO RESPONDEN	LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Y)					TOTAL Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1	4	5	4	5	4	22
2	5	4	5	4	5	23
3	4	5	4	5	4	22
4	5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	4	24
6	3	4	3	4	5	19
7	4	5	4	5	4	22
8	4	4	4	4	3	19
9	5	4	5	4	5	23
10	3	4	3	4	4	18
11	3	4	3	4	3	17
12	4	4	4	4	4	20
13	4	3	4	3	5	19
14	4	4	4	4	4	20
15	4	5	4	5	5	23
16	3	4	3	4	4	18
17	5	4	5	4	4	22
18	3	4	3	4	4	18
19	4	5	4	5	5	23
20	5	3	5	3	4	20
21	4	4	4	4	4	20
22	5	3	5	3	4	20
23	4	4	4	4	5	21
24	5	5	5	5	5	25
25	4	4	4	4	5	21
26	3	4	3	4	4	18
27	5	5	5	5	3	23
28	3	4	3	4	4	18
29	4	5	4	5	5	23
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	4	5	21
32	5	5	5	5	5	25

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	TOTAL_X2, TOTAL_X1 ^b		Enter

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.883 ^a	.779	.764	1.118

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	127.773	2	63.887	51.142	.000 ^b
	Residual	36.227	29	1.249		
	Total	164.000	31			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.128	2.334		-.055	.956
	TOTAL_X1	.723	.114	.719	6.329	.000

TOTAL_X2	.280	.139	.228	2.011	.054
----------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	TOTAL_X2, TOTAL_X1 ^b		Enter

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.883 ^a	.779	.764	1.118

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1

b. Dependent Variable: TOTAL_Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	127.773	2	63.887	51.142	.000 ^b
	Residual	36.227	29	1.249		
	Total	164.000	31			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**Dependent Variable: TOTAL_Y**